

Judul : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo: Pelaporan LHKPN Peringatan Dini Anggota Dewan
Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
BAMBANG SOESATYO:

Pelaporan LHKPN Peringatan Dini Anggota Dewan

Komisi Pemberantasan Korupsi merilis tingkat kepatuhan DPR dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya sebesar 21,46 persen. Dalam berbagai kesempatan wawancara, Ketua DPR Bambang Soesatyo sudah mengimbau agar anggota Dewan melaporkan hartanya. Berikut ini petikan wawancaranya, kemarin.

Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN merosot pada 2018, apa sebabnya?

Ketaatan melaporkan SPT (surat pemberitahuan tahunan) dan LHKPN sekaligus menjadi *early warning* bagi setiap pribadi anggota DPR RI. Jabatan yang diemban ini merupakan amanah yang sangat besar dari rakyat. Jangan sampai dirusak dengan keteledoran kami sendiri.

Soal kepatuhan kami sudah mengimbau. Dan waktu pelaporan juga masih sampai akhir Maret 2019 bersamaan dengan laporan SPT. Karena angka-angka di LHKPN harus *update* dengan SPT. Jadi, sabar saja.

Seperti apa imbauannya?

Walaupun batas waktu pelaporan SPT dan LHKPN sampai dengan akhir Maret 2019, ada baiknya sebagai anggota DPR RI terlebih dulu memelopori pelaporan tersebut sedini mungkin. Tidak perlu menunggu menjelang batas akhir. Lebih cepat justru lebih baik, sehingga masyarakat bisa terinspirasi dan melakukan hal serupa.



Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan anggota DPR?

Kami sudah membuka kantor perwakilan sekretariat di sini (Gedung DPR) untuk membantu anggota Dewan memperbaiki LHKPN setiap tahun. Kami mengingatkan juga, jadi seharusnya tidak rumit. Kawan-kawan anggota DPR tinggal datang ke Klinik e-LHKPN yang terletak di lobi Gedung Nusantara III DPR RI. Tinggal ketik perubahan, penambahan, atau pengurangan, tanpa repot-repot membawa dokumen.

Nyatanya, setelah ada Klinik e-LHKPN tingkat kepatuhan malah merosot...

Menurut saya, di DPR

itu mungkin saja masih ada pemikiran, kewajiban melaporkan hanya di awal dan akhir jabatan. Tapi nanti saya sebagai pimpinan akan mengingatkan anggota DPR melalui kesekjenan untuk mengedarkan semacam pemberitahuan kepada pimpinan fraksi.

Bagaimana langkah pimpinan selanjutnya?

Tugas kami adalah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk memperbaiki laporan, termasuk kepada anggota yang merasa tidak ada perubahan dalam asetnya. Mungkin beberapa orang merasa dalam setahun tidak ada penambahan aset. ● ARKHELAUS

WISNU | BUDIARTI UTAMI PUTRI